

Pelaksanaan Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan-Tali Tigo Sapilin (MTTS-TTS) oleh Masyarakat Nagari di Kabupaten Solok

Anthony Ibnu

**Pemerintah Daerah Kota Solok, Provinsi Sumatera
Barat**

anthonypdg.ai@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Solok merupakan salah satu pemerintah daerah yang melaksanakan sistem pemerintahan nagari. Pada awal pelaksanaan Pemerintahan nagari tersebut, banyak sekali terjadi dilema diantaranya permasalahan batas wilayah akibat penggabungan beberapa desa menjadi sebuah nagari. Selain itu pada awalnya pemerintahan nagari terdiri dari “urang nan ampek jinih” yaitu penghulu, malin, manti dan dubalang yang berfungsi sebagai pengatur pemerintahan terendah, namun pada saat ini pemerintahan nagari terdiri dari Wali Nagari yang dipilih oleh masyarakat nagari secara langsung, Badan Musyawarah Nagari (BMN) yang berperan sebagai pengawas jalannya pemerintahan nagari serta Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Majelis Ulama Nagari (MUN). Dengan adanya berbagai kepentingan dari masing-masing unsur tersebut, tidak jarang terjadi benturan dalam pelaksanaan pemerintahan dimana masing-masing unsur cenderung mengabaikan tugas dan fungsinya masing-masing yang pada akhirnya akan mengganggu dalam pelaksanaan pembangunan di nagari. Tentunya hal ini juga akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di nagari. Berangkat dari permasalahan yang timbul dalam menjalankan roda pemerintahan di nagari dan banyaknya keluhan masyarakat akibat tidak sejalannya unsur pemerintahan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Solok mengambil langkah dan inovasi untuk menyatukan kelompok-kolompok yang ada di pemerintahan nagari dengan istilah “duduak baropak, baiyo batido” yaitu duduk bersama memecahkan permasalahan yang ada dengan cara musyawarah. Kebiasaan ini merupakan kebudayaan dari para leluhur di Minangkabau yang pada saat ini sudah jarang sekali dilakukan oleh para pemuka masyarakat. Konsep musyawarah inilah yang kembali dihidupkan dalam kehidupan bernagari serta melibatkan seluruh unsur dan

dikenal dengan istilah Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan-Tali Tigo Sapilin (MTTS-TTS)

Kata kunci: MTTS-TTS, Kabupaten Solok

PENDAHULUAN

Perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dari masa ke masa telah mengalami banyak perubahan, sehingga sangat berpengaruh terhadap pengikisan nilai-nilai adat dan budaya yang ada di Minangkabau. Nilai yang dulu ada dan berkembang secara turun temurun sesuai dengan filosofi adat Minangkabau, pada saat ini telah mulai hilang terutama nilai-nilai kepemimpinan Minangkabau yang berlandaskan kepada *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai*. Setiap persoalan yang ada, harus dibicarakan secara bersama dengan sistem musyawarah mufakat. Dalam sistem ini tidak terdapat pihak yang dimenangkan, dan tidak ada pihak yang dirugikan, karena mencari solusi terbaik untuk kemaslahatan bersama.

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari saat ini telah jauh berbeda. Setiap permasalahan yang ada, dibicarakan pada tempat-tempat yang tidak pantas, seperti di warung, dan pusat-pusat keramaian, sehingga cenderung menimbulkan fitnah dalam nagari. Keharmonisan kelembagaan yang ada di nagaripun semakin hari semakin memburuk, yang menyebabkan Pemerintahan Nagari tidak berjalan dengan optimal. Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik merupakan salah satu penyebab meruncingnya hubungan tersebut. Tata kelola kehidupan masyarakat secara sosial, adat, budaya maupun agama juga tidak berjalan dengan baik. Unsur *tungku tigo sajarangan tali tigo sapilin* yang seharusnya menjadi tolok ukur, tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.

Menyikapi fenomena tersebut, perlu terobosan dan inovasi yang jitu dalam mencari solusi permasalahan yang bijak demi membangkitkan kembali nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau yang dulu pernah eksis dan menjadi salah tonggak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlu dibangkitkan kembali gairah bermusyawarah untuk mufakat dalam konteks *Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan Tali Tigo Sapilin (MTTS-TTS)* yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan yang ada di nagari, baik pihak pemangku adat, pemerintahan maupun penyelenggara dakwah

untuk umat dan syiar Islam yang identik dengan kehidupan masyarakat Minangkabau. Hal ini diharapkan menjadi perekat untuk mempersatukan dan memperkuat jalinan hubungan kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Minangkabau.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok melahirkan konsep untuk menghidupkan kembali nilai yang dulu pernah ada yaitu *Musyawahar Tungku Tigo Sajarangan Tali Tigo Sapilin (MTTS-TTS)*. Nilai ini bertujuan untuk menjawab semua tantangan dan permasalahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang ada pada saat ini, sehingga bisa menjadi sarana dalam mencari solusi untuk seluruh permasalahan yang ada di nagari.

TINJAUAN PUSTAKA

Komunikasi

Banyak pendapat para pakar tentang definisi dari komunikasi. Salah satunya seorang guru besar kepomongprajaan sekaligus alumni kepomongprajaan yaitu Prof. Erliana Hasan dalam bukunya yang berjudul “komunikasi pemerintahan”. Erliana Hasan (2014) menulis : komunikasi adalah suatu proses penyampaian pernyataan antar manusia dengan isi pikiran dan perasaannya. Pengungkapan isi pikiran dan perasaan apabila diaplikasikan secara benar dengan etika yang tepat, akan mampu mencegah dan menghindari konflik antar pribadi, antar kelompok, antar suku, antar bangsa, sehingga dapat memelihara persatuan dan kesatuan antar individu, keluarga maupun bangsa yang berbeda dari segi budaya, bahasa dan lingkungan. Bertolak dari pendapat diatas dapat diambil benang merahnya tentang konsep dan pengertian komunikasi” sebagai suatu proses penyampaian pikiran dan perasaan dari seseorang kepada orang lain guna menyatukan kekuatan sehingga orang-orang tersebut bergerak pada tindakan yang terorganisir.

Sedangkan menurut William Albig (1957) dalam bukunya yang berjudul “*publik opinion*” mengartikan komunikasi adalah “*the process of transmitting meaningful symbols between individuals*” (proses pemindahan simbol yang bermakna di antara individu-individu) dapat juga diartikan penyampaian pesan baik melalui lisan sandi maupun kode-kode dari pemberi pesan (komunikator) kepada penerima pesan (komunikan).

Lebih lanjut Erliana Hasan (2014) menerangkan, berkomunikasi yang efektif adalah melakukan koreksi diri melalui penghayatan bahwa aspek makna fundamental dalam berkomunikasi difahami sebagai upaya mencari kesamaan makna secara bersama-sama diantara pihak-pihak yang berkomunikasi. Pendapat ini ditegaskan oleh Upton dalam Erliana Hasan (2014) bahwa “komunikasi terjadi selama makna uraian berhubungan dengan makna yang ditafsirkan, karena keduanya adalah respons yang terkondisikan, keberhasilan komunikasi tergantung pada sejauh mana tingkat kesamaan pengalaman komunikasi yang dilakukan sebelumnya”

Unsur-unsur dasar dalam komunikasi adalah (1) adanya komunikator, (2) adanya esensi komunikasi/pesan, (3) adanya interaksi langsung maupun tidak langsung, (4) adanya media komunikasi yang digunakan secara benar, (5) pemahaman bersama akan esensi dan tujuan berkomunikasi, (6) umpan balik, (7) tumbuhnya kepercayaan (trust)

Pemerintahan

Definisi pemerintahan/government menurut C.F. Strong (1960) adalah organisasi dalam mana diletakan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi, pemerintahan dalam arti luas mencakup seluruh cabang kekuasaan pemerintahan negara (Eksekutif, legislatif dan Yudikatif) atau keseluruhan lembaga negara dan arti pemerintahan dalam arti sempit yaitu eksekutif. Menurut S.Pamudji (1995) pemerintahan mempunyai makna yaitu secara etimologis pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah, kalau perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan suatu perbuatan

Jadi ilmu pemerintahan menurut bapak ilmu pemerintahan G.A. Van Poelje (1942) adalah ilmu yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum secara sah bagi seluruh warga, dan menurut Taliziduhu Ndraha (2003) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil.

Jadi kenapa pemerintahan diperlukan ini dapat kita lihat dari definisi ilmu diatas dapat kita analisa bahwa untuk mencapai suatu kesejahteraan pada warga masyarakat itu di perlukan pemerintah jadi pemerintah harus dapat menghadirkan kesejahteraan kepada warganya, melindungi daan mengayomi, mewujudkan ketertiban dan tentraman, mengatur agar

terciptanya keteraturan, kalau kita lihat dari fungsinya pemerintah itu adalah regulation, development, empowerment dan service.

Musyawarah

Pengertian musyawarah sangat ringkas, padat dan tidak banyak yang mendefinisikan lebih jauh, karena makna dan pengertian musyawarah itu sendiri sudah sangat jelas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “musyawarah” adalah proses pembahasan suatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama. Jadi musyawarah merupakan proses membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah dilakukan sebagai cara untuk menghindari pemungutan suara yang menghasilkan kelompok minoritas dan mayoritas. Dengan musyawarah diharapkan dua atau beberapa pihak yang berbeda pendapat tidak terus bertikai dan mendapat jalan tengah. Karena itu, dalam proses musyawarah untuk mencapai kemufakatan, diperlukan kerendahan hati dan keikhlasan diri.

Dalam kehidupan kemasyarakatan, musyawarah memiliki beberapa manfaat langsung, yaitu sebagai berikut:

- Musyawarah merupakan cara yang tepat untuk mengatasi berbagai silang pendapat.
- Musyawarah berpeluang mengurangi penggunaan kekerasan dalam memperjuangkan kepentingan.
- Musyawarah berpotensi menghindari dan mengatasi kemungkinan terjadinya konflik.
- Musyawarah merupakan nilai yang dihasilkan dari akar budaya bangsa Indonesia. Musyawarah secara tegas dinyatakan dalam sila keempat dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sila keempat Pancasila menegaskan bahwa prinsip kerakyatan Indonesia harus dijalankan dengan cara permusyawaratan yang bijaksana.

Ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh dalam membuat keputusan bersama secara musyawarah, yakni sebagai berikut

- Pendapat disampaikan secara santun.
- Menghormati pendapat orang lain yang bertentangan pendapat.
- Mencari titik temu diantara pendapat-pendapat yang ada secara bijaksana.

- Menerima keputusan bersama secara besar hati, meski tidak sesuai dengan keinginan.
- Melaksanakan keputusan bersama dengan sepenuh hati.

Tungku Tigo Sajaringan Tali Tigo Sapilin

Minangkabau tidak saja unik dengan garis keturunannya, tetapi juga unik pada sistem kepemimpinannya dalam konsep Tungku Tigo Sajaringan yang terdiri dari tiga unsur.

- Pertama, Kepemimpinan ninik mamak, merupakan kepemimpinan tradisional, sesuai pola yang telah digariskan adat secara berkesinambungan, dengan arti kata “patah tumbuhan hilang baganti” dalam kaum masing-masing, dalam suku dan nagari, karena tinggi tampak jauh, gadang tampak dakek (jolong basuo) dan Padangnyo leba, alamnyo laweh. Tinggi dek dianjuang, gadang dek diambak.
- Kedua, Kepemimpinan alim ulama suluah bendang di nagari — suluah yang terang benderang dalam nagari — Alim ulamalah yang mengaji hukum-hukum agama, yang akan menjadi pegangan di dalam syarak mangato adaik mamakaikan, tentang sah dan batal, halal dengan haram dan mengerti tentang nahu dan sharaf. Secara umumnya, alim ulama akan membimbing rohani untuk menempuh jalan yang benar dalam kehidupan di dunia menuju jalan ke akhirat karena adat Minang itu adat Islami, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah.
- Ketiga, Kepemimpinan cerdik pandai yang tumbuh dari kelompok masyarakat yang mempunyai ilmu pengetahuan dan cerdik memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Ia pandai mencarikan jalan keluarnya, sehingga ia dianggap pemimpin yang mendampingi ninik mamak dan alim ulama. Kepemimpinan dan kharisma alim ulama dan cerdik pandai tidak terbatas pada lingkungan masyarakat tertentu saja, dan malahan peranannya jauh di luar masyarakat nagarinya.

Ketiga sistem kepemimpinan tadi dalam masyarakat Minangkabau disebut “tungku nan tigo sajarangan, tali nan tigo sapilin”. Mereka saling melengkapi dan menguatkan. Tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilin juga merupakan filosofi dalam kepemimpinan masyarakat Minangkabau.

Menurut Mas’oed Abiddin (2004), ketiga unsur tersebut menjadi simbol kepemimpinan yang memberi warna dan mempengaruhi perkembangan

masyarakat Minangkabau. Keberadaan tiga pemimpin informal tersebut terlembaga dalam idiom adat ; Tungku nan tigo sajarangan (Tungku yang tiga sejarangan), Tali nan tigo sapilin(Tali yang tiga seikatan), Nan tinggi tampak jauh (Yang tinggi tampak jauh), Tabarumbun tampak hampia (Tersembunyi tampak hampir). Ketiga bentuk kepemimpinan ini lahir dan ada, tidak terlepas dari perjalanan sejarah masyarakat Minangkabau sendiri yang dituntun oleh akhlak, sesuai bimbingan ajaran Islam, dalam adagium “Adat basandi Syara’ “, dan “syara’ mamutuih, Adat memakai”.

Nilai-nilai budaya dalam sistim kepemimpinan ini, telah menjadi pegangan hidup dalam hubungan atau tatanan bermasyarakat yang positif, bahkan mendorong dan merangsang, atau menjadi force of motivation, penggerak mendinamiseer satu kegiatan masyarakat dalam bernagari.Termasuk dalam menjaga dan memelihara karakter anak nagari dengan memiliki sifat dan kebiasaan-kebiasaan untuk mengembangkan kegiatan ekonomis seperti menghindari pemborosan, kebiasaan menyimpan, hidup berhemat, memelihara modal supaya jangan hancur.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan MTTs-TTS Di Kabupaten Solok

Secara jelas Forum MTTs-TTS yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok tidak terlepas dari nilai-nilai hakiki yang terkandung dalam MTTs-TTS itu sendiri, baik nilai secara Syarak maupun secara adat. Namun dalam pelaksanaanya hanya dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan nagari yang ada pada saat ini. Secara ringkas tujuan dari aplikasi pelaksanaan MTTs-TTS di Kabupaten Solok sebagai berikut :

- Mengokohkan kembali pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS – SBK) ditengah masyarakat di setiap nagari.
- Memperkuat silaturahmi dan rasa saling keterbukaan antar lembaga dan antar unsur masyarakat di nagari terkait persoalan yang ada di nagari agar tercipta hubungan yang harmonis pada setiap lembaga dan mayarakat nagari.
- Membangkitkan kembali nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, rasa memiliki dan partisipasi dala pembangunan nagari.

- Memperkuat fungsi nagari sebagai unit pemerintahan terdepan sebagai wilayah adat dan wilayah pemerintahan dengan keunikan nilai-nilai yang dimiliki masing-masing nagari dan keberagaman antar nagari.
- Menumbuhkembangkan sistem pewarisan dan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya di setiap nagari.
- Merupakan media konsultasi bagi perantau, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, bundo kanduang, dan lain-lain untuk menetapkan program serta rekomendasi kebijakan untuk mendukung kelancaran pembangunan nagari.
- Membicarakan semua permasalahan nagari berupa masalah sosial, budaya, adat istiadat, dan pembangunan di nagari.

Ruang Lingkup Pembahasan Dalam MTTs -TTS

Dalam Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan Tali Tigo Sapilin MTTs-TTS terdapat beberapa permasalahan yang dapat dibahas secara bersama:

- Permasalahan adat dan budaya yang berkembang di nagari, *Adaik Salingka Nagari Pusako Salingka Kaum*.
- Pembangunan Infrastruktur, ekonomi, sosial budaya dan keagamaan di nagari.
- Permasalahan hubungan antar nagari, rantau dan persoalan yang terkait dengan kelancaran pelaksanaan pemerintahan nagari.
- Hubungan antar lembaga, baik lembaga adat, lembaga keagamaan, maupun lembaga pemerintahan.
- Permasalahan lainnya yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat banyak.

Walaupun Musyawarah Tungku Tigo Sajarangan Tali Tigo Sapilin (MTTs-TTS) merupakan forum musyawarah nagari yang melibatkan seluruh unsur yang ada di nagari, dalam ruang lingkup bahasannya juga terdapat beberapa batasan yang harus dijaga sehingga tidak melampaui batas kewenangan yang dimiliki oleh forum tersebut. Diantara batas-batas tersebut adalah sebagai berikut :

- Persoalan yang menjadi kewenangan suku / kaum atau bersifat individu / keluarga.
- Persoalan yang tidak terkait dengan kemaslahatan masyarakat banyak.
- Persoalan politik yang menjurus kepada keberpihakan terhadap kelompok atau golongan tertentu.

Kepesertaan dan Narasumber MTTs-TTS

Peserta MTTs-TTS di nagari antara lain terdiri dari unsur sebagai berikut:

- Pemerintah Nagari
- Badan Musyawarah Nagari (BMN)
- Kerapatan Adat Nagari (KAN)
- Majelis Ulama Nagari (MUN)
- Lembaga Pembangunan Masyarakat Nagari (LPMN)
- Lembaga – lembaga lain yang ada di nagari
- Niniak Mamak
- Alim Ulama
- Cadiak Pandai
- Bundo Kandung
- Pemuda Nagari
- Tokoh Masyarakat Perantauan
- Tokoh masyarakat yang dianggap perlu
- Narasumber MTTs-TTS dapat berasal dari :
 - Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan dari Pemerintah Nagari
 - Tokoh Masyarakat sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
 - Unsur-unsur yang dianggap penting.

Faktor Penghambat Penyelenggaraan MTTs

- a. Lemahnya Pemahaman Terhadap Mekanisme Penyelenggaraan :
 - Pedoman pelaksanaan Musyawarah Tungku Tigo Sajaringan Tali Tigo Sapilin MTTs-TTS diatur melalui Peraturan Bupati Solok Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan MTTs-TTS. Mekanisme penyelenggaraan MTTs-TTS diatur secara teknis dan mengamanatkan dalam setiap pelaksanaan MTTs-TTS melahirkan rekomendasi atas setiap permasalahan nagari yang dibahas dalam forum tersebut. Kemudian rekomendasi yang dilahirkan disampaikan kepada pihak yang berwenang yang ada di nagari untuk kemudian ditindaklanjuti.
 - Pada sebagian nagari dalam pelaksanaan MTTs-TTS tidak berjalan sebagaimana mestinya karena kurangnya pemahaman terhadap substansi petunjuk teknis seperti dijelaskan di atas. Sebagian

masyarakat menganggap bahwa kehadiran kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dalam pelaksanaan MTTS-TTS merupakan pokok acara dari MTTS-TTS itu sendiri. Padahal intinya tidak demikian, kehadiran kepala daerah dan atau kepala daerah hanyalah sebagai pemberi arahan dan membuka acara tersebut. Kemudian seluruh unsur dan tokoh masyarakat yang hadir bermusyawarah terhadap seluruh permasalahan yang ada

- b. Kurang Proaktifnya Lembaga-Lembaga yang ada di nagari.

Pelaksanaan MTTS-TTS melibatkan seluruh unsur yang ada di nagari, baik unsur niniak mamak, unsur Cadiak pandai, dan unsur alim ulama beserta seluruh lembaga yang ada di nagari. Tujuan melibatkan seluruh lembaga yang ada di nagari adalah untuk menggali semua permasalahan yang ada sehingga tercipta saling keterbukaan dalam mencarikan solusi atas permasalahan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, pelaksanaan Komunikasi Kelompok MTTS-TTS di seluruh Nagari di Kabupaten Solok telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam perbaikan tata kelola kehidupan Pemerintahan, Sosial Budaya, Agama, maupun adat istiadat. Sehingga harus dilakukan perbaikan serta penyempurnaan terhadap sistem, mekanisme dan penganggaran kegiatan MTTS untuk pelaksanaan yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Mas'ued. 2004. Adat dan Syarak Minangkabau., Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), Sumatera Barat
- Hasan, Erliana, 2014. Komunikasi Pemerintahan., Universitas Terbuka, Tangsel
- Hasan, Alwi, 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia., Balai Pustaka, Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1, Rineka Cipta. Jakarta

Peraturan Bupati Solok Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan MTTs

<http://www.slideshare.net/pumdatin/ilmu-pemerintahan-s3-ipdn>